

**PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS DALAM PELAKSANAAN FUNGSI
PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN
KOMINFO KOTA PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi
Negara sebagai salah satu persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Negara**



Oleh :

**PINO SYAFRI TANJUNG
90803 / 2007**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis 23 Februari 2012 pukul 10.00 s/d 12.00 Wib

Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh

Nama : Pino Syafri Tanjung
TM/NIM : 2007/90803
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 23 Februari 2012

Tim Penguji

	Nama
Ketua	: Drs. H. Syafnil Effendi, SH. MH
Sekretaris	: Drs. Karjuni Dt. Maani. M.Si
Anggota	: Drs. Dasman Lanin, M.Pd.Ph.D
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si.
Anggota	: Junaidi Indrawadi, S.Pd.,M.Pd.

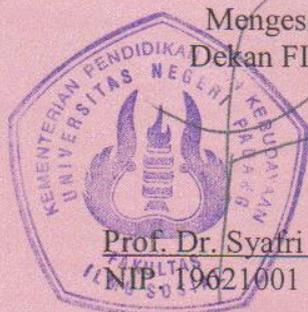
Tanda Tangan

Hayuni

[Signature]

[Signature]

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

Pino Syafri Tanjung :07/90803. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena terjadinya kasus dugaan korupsi penyimpangan kontrak parkir di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh. Salah satu tuntutan pelaksanaan *good governance* dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan adalah bagaimana pemerintah menciptakan suatu pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan fungsi pelayanan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa, Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh belum melaksanakan fungsi pelayanan sepenuhnya, karena masih ada permasalahan-permasalahan dalam proses pelayanan, hal ini terjadi karena terbatasnya sarana dan prasana serta kualitas SDM aparatur, dan jumlah personil yang terbatas. Dan tidak transparan memberikan informasi seperti tidak mencantumkan prosedur, serta tarif resmi perizinan pengujian kendaraan bermotor dan tidak disertai perangkat pendukungnya berupa papan pengumuman atau spanduk. Selain itu tidak transparan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, terutama pada tiap-tiap pos TPR tidak memberikan karcis resmi tarif TPR. Akan tetapi Dinas perhubungan telah berusaha untuk menerapkan akuntabilitas, seperti adanya *output* dan *outcome* yang terukur dengan melaksanakan Rencana Strategis tahun 2010, dibuktikan dengan Pencapaian Program dan Rencana Strategis tahun 2011.

Diharapkan untuk masa yang akan datang Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh melakukan penambahan personil, melaksanakan pembangunan sarana dan prasana, serta semakin banyaknya personil mengikuti diklat teknis di bidang perhubungan. meningkatkan kualitas SDM dengan harapan Kantor Perhubungan memiliki Program yang terencana serta memiliki SDM yang mampu mengaplikasikan perencanaan yang telah ditetapkan di lapangan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh.”**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph,D, dan Ibu Henni Muchtar, SH. M.Hum, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP.
3. Bapak Drs. H. Syafnil Effendi, SH. MH (Alm), selaku pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, informasi, dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Drs. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D, Bapak Drs. Syamsir M.Si, dan Bapak Junaidi Indrawadi, S.Pd. M.Pd, selaku tim penguji yang telah banyak memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si, selaku Dosen Penasehat Akademis.
7. Bapak/Ibu staf pengajar Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP.

8. Teristimewa untuk orang tuaku dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan dengan doa, semangat, serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Rekan-rekanku program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2007, terimakasih atas segala kebaikannya terutama bagi teman-teman tercinta IAN NR 07 serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang diberikan pada penulis mendapat redho dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis bermohon, semoga apa yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Padang, Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah.....	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Batasan Masalah.....	7
3. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	9
1. Pemerintahan dan Fungsi-Fungsinya.....	9
2. Konsep <i>Good Governance</i>	13
3. Konsep Transparansi dan Akuntabilitas.....	15
a. Konsep dan Pengertian Transparansi.....	15
b. Konsep dan Pengertian Akuntabilitas.....	19
B. Kerangka Konseptual.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Informan Penelitian.....	25
C. Fokus Penelitian.....	26
D. Lokasi Penelitian.....	26
E. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengolahan Data.....	27
1. Jenis dan Sumber Data.....	27
2. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Uji Keabsahan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Penelitian.....	31
B. Temuan Khusus Penelitian.....	40
C. Analisis dan Pembahasan.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Pegawai Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh ...	76
Tabel 4.2 : Fasilitas Lalu Lintas di Kota Payakumbuh.....	42
Tabel 4.3 : Kondisi Terminal Bus Koto Nan IV.....	44
Tabel 4.4 : Rekapitulasi Kendaraan Angkutan Kota Di Kota Payakumbuh Tahun 2010.....	47
Tabel 4.5 : Data Kendaraan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).....	78
Tabel 4.6 : Lokasi dan Daya Tampung Tempat Parkir.....	49
Tabel 7 : Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh 2012.....	90
Tabel 4.8 : Renstra 2008-2013 Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh.....	81
Tabel 4.9 : Pencapaian Program dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh tahun 2011.....	84

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.4 Kerangka Konseptual.....	23
Gambar 2.4 Terminal Koto Nan IV Payakumbuh.....	46
Gambar 3.4 Kantor Pengurusan KIR DISHUB.....	54
Gambar 4.4 Fasilitas Pengujian KIR.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian	91
Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian.....	92
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian.....	93
Lampiran 8 : Daftar Wawancara Penelitian.....	94

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1998 bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dari KKN, tegaknya hukum dan keadilan serta hak azasi manusia, efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Gerakan ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari perkembangan kesadaran masyarakat, yang pada gilirannya menimbulkan berbagai kekecewaan pada pelaksanaan pemerintahan yang bersifat otoriter di masa lampau.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita – cita bangsa dan negara. Dalam hal ini, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut Sedarmayanti (2003:2) perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi masyarakat luas.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana

pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang merupakan limpahan Pemerintah Pusat kepada Daerah. Meskipun demikian, urusan pemerintahan tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional masih diatur Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka Desentralisasi Fiskal. Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan Pusat-Daerah dan antar Daerah.

Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Implementasi *good governance* pada organisasi pemerintahan daerah diharapkan akan menghasilkan sistem pemerintahan yang baik untuk mencapai tujuan yang telah dituang dalam pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan *good public* dan *corporate governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, tuntutan pembaharuan sistem keuangan agar pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan dengan mendasar pada konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2002:20).

Mardiasmo (2002:24) menjelaskan terdapat 9 prinsip *good governance* antara lain: *participations, rule of law, transparansi, responsiveness, profesionalitas, equity, value for money (economy, efficiency and effectiveness), accountability, strategic vision*. Dari sembilan karakteristik *good governance*, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money*. Menurut

Sedarmayanti (2004:24) karakteristik pemerintahan yang baik, paling tidak memiliki tiga karakteristik utama, yaitu: transparansi, supremasi hukum, dan akuntabilitas.

Kriteria atau unsur-unsur yang dikemukakan tersebut, akuntabilitas dan transparansi merupakan dua kriteria pokok yang selalu ada dalam *good governance*. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* dewasa ini boleh dikatakan sebagai harga mati yang harus dilakukan pemerintah. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban lembaga eksekutif selain disebabkan oleh adanya tuntutan perkembangan paradigma *good governance* dan perkembangan demokratisasi, juga karena kesadaran kritis masyarakat yang sudah mulai tumbuh subur.

Permasalahan transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Untuk mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Keberhasilan dan kegagalan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas akan sangat besar artinya bagi upaya memperbaiki pemerintahan dan pengelolaan kekuasaan di Indonesia. Karena itu, upaya yang sungguh-sungguh

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu keniscayaan kalau kita ingin membangun Indonesia baru yang lebih baik. Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Akuntabilitas sangat terkait dengan transparansi, dapat dikatakan tidak ada akuntabilitas tanpa adanya transparansi. Menurut penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi Nepotismen (KKN) transparansi diartikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Namun dalam kenyataannya, penerapan transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terlihat dengan adanya penuturan Tri Karyono (Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh) yang menyatakan bahwa pernah menyelidiki sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kota Payakumbuh. Diantaranya kasus dugaan korupsi penyimpangan kontrak parkir di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh (<http://padang-today.com>).

Dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh tidak transparan dalam pelaksanaan kontrak parkir, serta tidak akuntabel dalam memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah yaitu Pemerintahan Kota Payakumbuh.

Hal ini tidak sesuai dengan visi pemerintahan Kota Payakumbuh, yaitu :*“Terwujudnya Payakumbuh sebagai kota sehat dan mandiri yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, dan bertaqwa”*. Pengertian kota sehat disini adalah sehat dalam arti luas yang meliputi aspek-aspek kesehatan itu sendiri, pendidikan, perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup yang bersih dan menyenangkan. Termasuk pula dalam pengertian kota sehat ini adalah terlaksananya tata pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, demokratis, dan berlandaskan hukum serta Menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*) (<http://payakumbuhkota.go.id>).

Dengan adanya permasalahan di atas, tentu merupakan hambatan untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna menciptakan tata pemerintahan yang baik, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Walaupun pada saat ini pemerintah telah menerapkan *good governance* pada pemerintah daerah, namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan penyimpangan yang terdapat dalam tubuh pemerintahan daerah yang menyebabkan buruknya kinerja pemerintah daerah dan tidak tercapainya tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini yang menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang **Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh.**

B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Terjadinya kasus dugaan penyimpangan kontrak parkir di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh.
- b. Kurangnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan fungsi pelayanan pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mengingat kemampuan yang peneliti miliki, serta untuk mempertajam objek pembahasan, maka peneliti membatasi pembahasannya, yaitu tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi pelayanan pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh.

3. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi pelayanan pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan fungsi pelayanan

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pengembangan konsep ilmu pengetahuan terutama dalam mata kuliah Teori Administrasi Negara.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Payakumbuh untuk mewujudkan *good governance*, terutama yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi pelayanan.